

BAB III

DINAMIKA DAN RESPON DUNIA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK YAMAN

Konflik yang terjadi di Yaman pada dasarnya telah mengalami berbagai dinamika dan perkembangan yang sangat besar. Untuk itu, sebelum menganalisis peran PBB dalam konflik Yaman, terlebih dahulu untuk mencermati bagaimana perkembangan dan dinamika konflik Yaman 2014-2018.

Untuk itu, pada bab ini secara khusus penulis akan memaparkan sejarah konflik Yaman sejak negara ini mengalami dua kali fase perang, mulai 1994 hingga saat konflik terjadi lagi 2004-2012. Setelah itu, penulis kemudian akan menganalisis siapa saja pihak eksternal yang terlibat dalam konflik Yaman.

A. Sejarah Konflik Yaman

Sejatinya, sebelum perang saudara di Yaman pecah pasca *Arab Spring* tahun 2011, Yaman telah lebih dulu mengalami dua fase perang saudara yakni pada tahun 1994 dan tahun 2004-2012. Sebelumnya, Yaman terbagi dua menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan yang kemudian disatukan menjadi Republik Yaman pada tahun 1990. Presiden Ali Abdullah Saleh menjadi Presiden Yaman Utara dan Presiden Yaman Selatan, Ali Salem Al-Baidh, menjadi wakil presiden. Namun, dalam prakteknya, penyatuan tersebut mengalami masalah perekonomian sehingga Yaman mengalami krisis pada tahun 1991. Barulah pada tahun 1993, Yaman dapat menyelenggarakan pemilihan umum. Pada tahun 1994, perang saudara terjadi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Setelah itu, perang saudara muncul pada tahun 1994 yang dipicu oleh separatisme Yaman Selatan. Pasca perang saudara, pemilu baru dapat digelar kembali pada tahun 1997 (Nursya'bani, 2018).

Perang saudara kedua terjadi pada tahun 2004 hingga tahun 2012 yakni antara pemerintah Yaman dan Houthi. Gerakan Houthi (juga dikenal sebagai Ansar Allah atau Partisan Allah) adalah sebuah gerakan revivalis politik dan pemberontak Syiah Zaydi yang dominan. Zaydis Yaman mengambil nama mereka dari Imam kelima mereka, Zayd ibn Ali, cucu Husayn.

Zayd memberontak terhadap Kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 740, dengan percaya bahwa pemerintahan tersebut korup, dan sampai hari ini, Zaydis percaya bahwa imam mereka (penguasa komunitas) harus menjadi keturunan Ali (sepupu dan menantu nabi Muhammad). Zaydis menganggap bahwa memberontak atau melawan penguasa yang tidak adil dan korupsi adalah tugas agama. Negara Zaydi (atau Imamah) didirikan di Yaman Utara pada tahun 893 dan berlangsung dalam berbagai bentuk sampai revolusi republik 1962. Imam-imam modern Yaman mempertahankan negara mereka di dataran tinggi Yaman dalam isolasi yang ekstrem, karena pengunjung asing memerlukan izin penguasa untuk memasuki wilayah tersebut. Meskipun Zaydisme adalah cabang dari Islam Syiah, tradisi hukum dan praktik keagamaannya mirip dengan Islam Sunni. Selain itu, secara doktrin berbeda dari “Syiah Twelver” yang merupakan cabang dominan Islam Syiah di Iran dan Lebanon (Sharp, 2018).

Pada awalnya, gerakan yang dibentuk oleh Husein Badaruddin al-Houthi ini bertujuan damai dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Akan tetapi sejak tahun 2000-2003 ketegangan antara Kelompok Houthi dan pemerintah Yaman terjadi, ditandai oleh banyaknya demonstrasi anti-pemerintah yang dipimpin oleh Husein Badaruddin al-Houthi. Demonstrasi tersebut terjadi akibat diskriminasi sosial dan politik yang dilakukan oleh pemerintah Yaman yang beraliran Sunni terhadap kaum Syiah di Yaman Utara. Orang-orang Syiah Yaman tidak diberi hak untuk mendirikan sekolah-sekolah agama khusus Syiah dan dilarang menyelenggarakan perayaan khas Syiah seperti Idul Ghadir. Selain itu, Kebencian kelompok Houthi semakin menjadi ketika Amerika Serikat melakukan agresi militer ke Irak yang didukung oleh pemerintah Yaman. Dukungan tersebut kemudian memunculkan berbagai aksi protes secara besar-besaran pada tahun 2003 di Provinsi Sa’adah (Jakti, 2015).

Pada September 2004, Menteri Pertahanan Yaman mengumumkan bahwa Husein telah tewas oleh militer Yaman di pegunungan sekitar Sa’adah. Berawal dari berbagai faktor tersebut, akhirnya Houthi tumbuh dan berkembang menjadi

kelompok pemberontak di Yaman. Perang saudara tersebut telah membuat kelompok Syiah biasa al-Houthi menjadi kelompok militer-politik yang menerima dukungan dari komunitas Syiah lainnya (Serebrov, 2017).

Selain itu, konflik perebutan kekuasaan juga terjadi dalam tubuh pemerintahan Yaman pada tahun 2007 hingga 2010 tepat sebelum *Arab Spring*. Terdapat dua partai politik besar yakni Jamaah Islam al-Islah dan *the General People's Congress* (GPC). Perebutan kekuasaan dan perpecahan konflik membuat dua partai besar tersebut runtuh. Suku al-Islah yang dipimpin oleh klan Syeikhal-Ahmar menjadi penentang klan Presiden Ali Abdullah Saleh. Sementara itu, ancaman lain muncul dari organisasi teroris yang berbasis di Yaman yakni *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP). AQAP semakin meningkatkan kekuatannya pada tahun 2010 dan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan Arab Saudi (Guidero & Hallward, 2019).

Krisis politik tahun 2009 hingga 2010 di Yaman menjadi penunda masuknya Yaman dalam keanggotaan *Gulf Cooperation Council* (GCC). Kemudian, krisis politik tersebut juga telah masuk dalam dokumen yang diajukan pada Konferensi Internasional London pada Januari 2010. Konferensi tersebut menetapkan Arab Saudi dan Inggris sebagai negara yang akan membantu menstabilkan rezim di Yaman (Serebrov, 2017).

Bertepatan dengan fenomena *Arab Spring* melanda semenanjung Arab, pada November 2011, terjadi demonstrasi besar yang dijalankan oleh gerakan pemuda Yaman yang mengancam akan meningkatkan demonstrasi menjadi konflik bersenjata. Kelompok demonstran tersebut diorganisir oleh koalisi partai oposisi Yaman yang dikenal dengan *Joint Meeting Parties* (JMP). Mereka menuntut Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh untuk turun jabatan.

Awalnya demonstrasi ini berjalan dengan damai, namun respon dari Presiden Saleh cukup represif sehingga menggiring konflik menjadi semakin parah. Pada 18 Maret 2011, setidaknya 45 orang menjadi korban setelah loyalis Saleh menembaki kelompok anti-pemerintah di Sana'a. Dua hari setelahnya, terjadi manuver politik yang dilakukan oleh Jenderal Ali Mohsin al-Ahmar, yang merupakan Komandan Divisi Lapis Baja Pertama

dan Komandan Zona Militer Barat Laut. Mohsin mengatakan keberpihakannya kepada oposisi dan melepaskan diri dari pemerintahan Saleh. Ia bersumpah untuk melindungi dan membela para demonstran (Sharp, 2018).

Sebagai akibatnya, aparat keamanan militer terpecah menjadi pengikut oposisi dan pengikut pemerintah. Pengikut oposisi terdiri dari Divisi Lapis Baja Pertama dan zona militer barat laut, serta komandan angkatan darat dan udara. Sementara pengikut pemerintah terdiri dari Pengawal Presiden dan Pasukan Keamanan Pusat.

Melihat konflik yang semakin membesar, akhirnya pada 23 November 2011, Presiden Saleh menandatangani kesepakatan dari inisiatif GCC untuk turun dari jabatan presiden dan memberikan jabatan tersebut kepada wakilnya, Abd Rabbuh Mansur Hadi. Perjanjian tersebut dilengkapi dengan mekanisme yang disponsori oleh PBB, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Jamal Benomar, untuk periode transisi yang mengandung tiga tugas utama yakni: 1) Mengadakan dialog nasional dengan tujuan mengatasi masalah politik negara dan menghasilkan konstitusi baru, yakni dengan mengembangkan solusi berbasis konsensus untuk mengubah Yaman menjadi negara federal; 2) Menangani masalah keadilan transisi dengan menyusun solusi untuk masalah Yaman Selatan yang akan disetujui oleh orang-orang di selatan; 3) Mereformasi angkatan bersenjata menjadi militer yang bersatu dengan menghilangkan perpecahan dalam tentara yang disebabkan oleh pembelotan Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar ke al-Islah pada Maret 2011 (Arraf, 2017).

Berdasarkan tugas pertama inisiatif GCC, Presiden Hadi kemudian mengumpulkan para fraksi politik yang berseteru untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada Bulan Maret tahun 2013 hingga Januari 2014 pemerintah Yaman beserta dengan kelompok-kelompok politik lain termasuk Houthi mengadakan rekonsiliasi dan perundingan yang dikenal dengan *National Dialogue Conference* (NDC). PBB dan GCC terlibat dalam NDC tersebut. Perundingan NDC tampaknya tidak terlalu berhasil membawa perdamaian seperti yang diharapkan (Lembaga Kajian Syamina, 2017). Pejuang Houthi memanfaatkan situasi atas kurangnya dukungan militer terhadap Presiden baru Mansur

Hadi. Sehingga, pada September 2014, para pejuang Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan memaksa Presiden Hadi untuk menegaskan pemerintah dan persatuan dengan faksi-faksi politik lainnya.

Pasca Houthi berhasil menduduki Sana'a, pada 21 September 2014 disepakati sebuah perjanjian yang dikenal sebagai *Peace and National Partnership Agreement*. Akan tetapi, perjanjian ini pun tidak membawa hasil yang baik bahkan memudahkan harapan akan terciptanya perdamaian. Konflik kembali pecah pada bulan Januari 2015 yaitu pada saat Presiden Hadi mengumumkan rancangan konstitusi baru untuk pembentukan enam kawasan federasi Yaman. Pembentukan enam kawasan baru itu di tolak oleh kelompok Houthi karena di anggap sebagai tindak pelemahan ke mereka, akibatnya kelompok Houthi kembali melakukan perlawanan. Penyerangan oleh kelompok Houthi kembali terjadi pada 20 Januari 2015. Mereka menyerang Istana Perdana Menteri Yaman setelah sehari sebelumnya menyerang istana kepresidenan. Serangan ini diakhiri dengan gencatan senjata oleh kedua belah pihak (Saputri, 2015).

Selain ibukota Sana'a, Houthi juga menguasai kota dan pelabuhan Laut Merah Hudaydah. Hudaydah merupakan pelabuhan terbesar kedua Yaman setelah Aden. Kontrol Hudaydah adalah kunci untuk memasok kebutuhan bagi ibukota nasional Sana'a yang dikuasai Houthi. Pelabuhan ini juga berada di utara selat Bab al Mandab, salah satu *chokepoint* maritim dunia. Hudaydah juga menghasilkan pendapatan untuk Houthi, yakni pajak impor dan mengendalikan distribusi makanan dan bahan bakar (Alkaff, 2015).

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2015, Presiden Hadi menyatakan mundur dari jabatan Presiden Yaman ditengah-tengah protes. Mundurnya Presiden Hadi menyebabkan kekosongan kekuasaan di pemerintahan Yaman. Kekosongan tersebut membuat kelompok Houthi berhasil mengambil alih pemerintahan Yaman, merebut sebagian besar ibukota serta menduduki fasilitas pemerintahan. Presiden Hadi pun dijadikan sebagai tahanan rumah. Bahkan kelompok Houthi juga membentuk struktur pemerintahan yang baru dan membubarkan

parlemen Yaman (Saputri, 2015). Pengambil alihan kekuasaan oleh Houthi tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat Yaman dan negara-negara teluk.

Presiden Hadi berhasil melarikan diri pada 22 Februari 2015 dari ibu kota Sana'a ke kota pelabuhan selatan Aden dengan bantuan Dewan Keamanan PBB. Pada 24 Februari 2015, presiden Hadi mengumumkan Aden sebagai ibu kota sementara Yaman dan menyerukan tentara untuk bergabung dengannya. Selain itu, pemerintahan Hadi juga meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk untuk memulihkan kekuasaannya di Yaman. Karena permohonan dari pemerintahan Presiden Hadi, maka pada tanggal 25 Maret 2015 Arab Saudi secara resmi memimpin serangan udara ke Yaman yang dikenal sebagai *Operation Decisive Storm* sebagai bentuk intervensi langsung ke Yaman. Namun demikian, tidak hanya Presiden Hadi saja yang mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Akan tetapi, kelompok Houthi pun dikabarkan mendapatkan dukungan dari Iran (Amin, 2015).

B. Keterlibatan Dunia Internasional terhadap Konflik Yaman

Respon Internasional pada konflik Yaman pecah ketika koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi melakukan intervensi militer pada 25 Maret 2015 di Yaman. Koalisi tersebut mencakup Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar, Sudan dan Uni Emirat Arab dan menerima dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi tersebut bersikeras untuk mengacu pada konsensus internasional yang dikeluarkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216 pada April 2015 sebagai landasan untuk mengakhiri konflik. Namun, tuntutan koalisi ditolak oleh Houthi bersama dengan penolakannya terhadap Resolusi 2216.

Sementara itu, Houthi terus memperkuat pengaruhnya di Yaman Utara. Pada tanggal 04 Desember 2017, Houthi telah membunuh mantan presiden Ali Abdullah Saleh, mantan sekutu Houthi. Sejak saat itu, tidak ada satupun saingan Yaman untuk menentang pemerintahan Houthi di Yaman Utara (Sharp, 2018).

Hingga tahun 2018, Koalisi telah maju ke pinggiran kota dan mengambil sebagian besar bandara Hudaydah. Akan tetapi,

pada tanggal 23 Juni 2018, Koalisi menghentikan serangan di kota Hudaydah untuk memberikan kesempatan kepada Martin Griffiths, Utusan Khusus PBB dalam konflik Yaman, untuk menegosiasikan gencatan senjata. Ratusan ribu warga sipil tetap berada di Hudaydah. Setiap konflik perkotaan berisiko tidak hanya menimbulkan banyak korban sipil, tetapi juga menghancurkan pelabuhan yang akhirnya memperburuk kekurangan makanan di seluruh Yaman Utara. Organisasi kemanusiaan dan bantuan internasional telah bersatu menyerukan Koalisi agar menahan diri untuk menyerang Hudaydah dan menjaga pelabuhan tetap terbuka untuk pengiriman makanan dan bahan bakar ke Yaman. Pada awal Agustus, puluhan warga Yaman tewas dalam serangan terhadap pasar ikan dan rumah sakit di dalam kota Hudaydah. Koalisi telah membantah melakukan serangan ini, mengklaim bahwa puluhan warga sipil tewas akibat tembakan mortir Houthi (Sharp, 2018).

1. Arab Saudi

Pertemuan personal yang dilakukan oleh Presiden Hadi dan almarhum Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz Al Saud mencatat bahwa, pada awal 2012 sikap Arab Saudi terhadap Houthi didasarkan pada alasan berikut:

- a. Iran ingin menggagalkan Inisiatif GCC karena dua alasan ; 1) Inisiatif tersebut diusulkan oleh negara-negara Teluk, dan 2) Inisiatif tersebut ditandatangani di Riyadh, dan Iran menentang keberhasilan inisiatif perdamaian apa pun yang datang dari Arab Saudi.
- b. Iran ingin mengubah Yaman menjadi koridor untuk tujuan mendestabilisasi Arab Saudi dan merebut Mekah dan Madinah.
- c. Iran ingin menetapkan kendali atas navigasi maritim melalui Selat Mandeb.

Pertimbangan-pertimbangan ini mendasari gerakan para penginisiasi Inisiatif GCC yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk menghentikan misi penjaga perdamaian PBB di Yaman dengan cara intervensi militer (Serebrov, 2017).

Pada bulan Maret 2015, Presiden Hadi melarikan diri ke Arab Saudi dan memohon intervensi internasional. Arab Saudi dengan cepat membentuk koalisi internasional dan meluncurkan serangan militer yang bertujuan memulihkan pemerintahan Hadi dan mengusir pejuang Houthi dari ibukota dan kota-kota besar lainnya. Pasukan koalisi yang dipimpin Saudi mulai melakukan serangan udara terhadap pasukan Houthi-Saleh dan memberlakukan batasan ketat pada lalu lintas laut dan udara ke Yaman.

Sejak awal, Arab Saudi mencari dukungan material dan militer dari Amerika Serikat untuk intervensi militer ke Yaman. Kemudian, Presiden Obama menyetujui kerjasama militer dengan memberikan penyediaan dukungan logistik dan intelijen untuk operasi militer yang dipimpin GCC. Ia juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan membangun *Joint Planning Cell* dengan Arab Saudi untuk mengkoordinasikan dukungan militer dan intelijen Amerika Serikat. Personil Amerika Serikat CENTCOM (*The United States Central Command*) dikerahkan untuk memberikan dukungan terkait dan pengisian bahan bakar *air-to-air* untuk pesawat koalisi dimulai pada April 2015.

Pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi memimpin intervensi militer di Yaman, tepatnya di ibukota Sana'a. Arab Saudi melakukan serangan udara menggunakan rudal dan pesawat tempur (BBC News, 2015). Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA) berkoalisi untuk menyerang markas Houthi di Yaman. Keduanya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap ancaman Iran. Namun keduanya memiliki keprihatinan yang berbeda. Arab Saudi memiliki fokus lebih pada poros Houthi, sementara UEA lebih peduli tentang partai Ikhwanul Muslimin Yaman, Islah. Disamping Arab Saudi dan UEA, terdapat aktor lain yang menjadi sponsor militer penyerangan ke Houthi yakni Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat tentu mengincar lawan perang melawan terorismenya seperti ISIS dan AQAP yang mendapatkan keuntungan akibat konflik Yaman ini (Serebrov, 2017).

Pada tanggal 12 Juni 2018, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi meluncurkan *Operation Golden Victory*, dengan tujuan merebut kembali kota pelabuhan Laut Merah Hudaydah dari tangan Houthi (Sharp, 2018). Kota tersebut merupakan tempat penting untuk mengirim makanan dan bantuan lainnya ke Yaman. Namun sayangnya serangan yang dilakukan oleh Koalisi tidak hanya mengenai sasaran Houthi, tetapi juga mengenai warga sipil yang berada disekitarnya (Arraf, 2017).

Sejak tahun 2015, pelaksanaan serangan udara yang dipimpin Arab Saudi melawan Houthi dan dukungan Amerika Serikat untuk operasi tersebut telah menarik perhatian internasional. Kabarnya, serangan-serangan tersebut banyak menargetkan infrastruktur sipil dan membunuh ribuan warga sipil Yaman. Para kritikus menuduh bahwa Arab Saudi khususnya harus dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum humaniter internasional dengan terus-menerus gagal untuk membedakan antara target kombatan dan warga sipil yang tidak bersalah.

Menurut *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR), sejak konflik dimulai pada 25 Maret 2015 hingga 09 Agustus 2018, PBB telah mendokumentasikan sebanyak total 17.062 korban sipil, dimana 6.592 korban meninggal dan 10.470 korban terluka. Menurut UNHCHR, sebagian besar korban tersebut adalah akibat akibat dari serangan udara yang dilakukan oleh Koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Sejak Maret 2015, beberapa serangan udara Koalisi yang paling mematikan meliputi:

- a. September 2015: serangan udara Koalisi mengenai pesta pernikahan, yang menewaskan sedikitnya 81 warga sipil.
- b. Maret 2016: serangan udara Koalisi menghantam pasar di barat laut Yaman, yang menewaskan sedikitnya 97 warga sipil dan sekitar 10 pejuang Houthi.
- c. Oktober 2016: serangan udara Koalisi menghantam aula pemakaman di Sana'a, yang menewaskan antara 130 dan 150 orang.

- d. Desember 2017: Dalam satu hari, serangan udara Koalisi menghantam pasar di provinsi Ta'izz, yang menewaskan 54 orang sementara serangan kedua menewaskan 14 anggota satu keluarga di provinsi Hudaydah.
- e. April 2018: serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi menghantam pesta pernikahan di provinsi Hajjah, menewaskan lebih dari 20 orang;
- f. Agustus 2018: serangan udara Koalisi menabrak bus di sebuah pasar dekat Dahyan, Yaman, di kantor gubernur Sa'dah Utara yang berbatasan dengan perbatasan Saudi, menewaskan 51 orang, 40 di antaranya adalah anak-anak. Koalisi mengklaim bahwa serangan udara itu adalah operasi militer yang sah yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan rudal Houthi di kota Saudi Jizan sehari sebelumnya yang menewaskan seorang warga Yaman di kerajaan (Sharp, 2018).

Menanggapi tuduhan internasional tersebut, Arab Saudi mengakui bahwa beberapa operasinya secara tidak sengaja telah menyebabkan korban sipil. Namun, Arab Saudi tetap mempertahankan kampanye militernya dengan argumen bahwa tindakan mereka merupakan tindakan membela diri yang sah karena serangan lintas perbatasan mematikan yang berulang-ulang dari musuh-musuh mereka di Yaman, termasuk serangan rudal balistik. Serangan Arab Saudi telah difokuskan pada target yang berhubungan dengan rudal, yang diduga unit lokasi pertempuran Houthi dan tempat pemimpin senior Houthi.

Joint Incidents Assessment Team (JIAT) telah meninjau serangan udara yang dilaporkan menewaskan korban sipil. Menurut laporan tersebut, pada bulan September 2017, JIAT telah mengungkapkan hanya ada tiga kesalahan dari total 15 serangan yang dilakukan, dan Koalisi telah menjalankan prosedur penyerangan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Namun, para kritikus melihat data yang dikeluarkan oleh JIAT dinilai tidak cukup untuk mengidentifikasi penyerangan Arab Saudi. Sehingga,

mereka menyarankan Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan militernya terhadap Arab Saudi.

Berdasarkan laporan *White Paper* yang dirilis oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington D.C., alasan utama intervensi yang dipimpin oleh Arab Saudi adalah sebagai berikut:

- a. Arab Saudi berupaya untuk memulihkan pemerintahan Yaman dan melindungi perbatasannya dari milisi Houthi yang didukung oleh Iran. Situasi konflik di Yaman telah menjadi ancaman nasional bagi Arab Saudi untuk melindungi warga negaranya agar tidak menjadi sasaran serangan rudal balistik terhadap pusat-pusat populasi seperti Mekah.
- b. Arab Saudi berkomitmen untuk menjunjung tinggi solusi politik damai untuk konflik di Yaman seperti mendorong implementasi Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB, Inisiatif GCC, dan Dialog Nasional Yaman. Arab Saudi juga menyerukan penarikan pasukan Sana'a dan bidang-bidang utama lainnya serta pemindahan semua senjata berat, termasuk rudal balistik, dari Houthi ke pihak ketiga yang netral. Arab Saudi menganggap warga Houthi memiliki hak untuk menjadi bagian dari proses politik di Yaman, tetapi mereka tidak dapat menggunakan agresi dan senjata militer untuk mengganggu ketertiban nasional dan keamanan regional. Namun, Houthi terus menunjukkan itikad buruk dalam bernegosiasi. Arab Saudi dan komunitas internasional telah membuat lebih dari 70 perjanjian dengan Houthi dan mantan presiden Saleh, tetapi Houthi terus mengingkari setiap perjanjian. Perlu dicatat bahwa Intervensi militer dilakukan hanya setelah upaya diplomatik yang berulang gagal.
- c. Arab Saudi masih menganggap musuh utama yang menjalankan konflik di Yaman adalah Iran. Iran menunjukkan agresi militernya di Yaman sama seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Bahrain dan Libanon. Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)*

telah memberikan uang, pelatihan, dan persenjataan kepada Houthi selama lebih dari satu dekade. Menurut artikel Reuters, pada Februari 2017, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Qods, bertemu pejabat IRGC terkemuka di Teheran untuk mengevaluasi rencana yang akan lebih menguntungkan Houthi di Yaman. Menteri Pertahanan Mattis di Riyadh baru-baru ini menegaskan bahwa Iran sekali lagi tidak membantu di Yaman. Sekretaris Mattis mengatakan Angkatan Laut Prancis, Australia, dan Amerika Serikat telah mencegah dukungan dan senjata Iran dalam perjalanan ke Yaman pada Oktober 2016.

- d. Houthi telah berulang kali melanggar hukum humaniter internasional dengan desain. Milisi Houthi telah menembaki sasaran sipil, menanam ranjau darat di daerah sipil dan memaksa anak-anak masuk ke dalam barisan tentara mereka. Orang Houthi menggunakan bantuan sebagai senjata. Di pelabuhan di bawah kendali mereka, seperti Pelabuhan Hudaydah, Houthi menjual bantuan kemanusiaan di pasar gelap untuk membeli senjata (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia Washington D.C., 2017).

2. Iran

Kepentingan Houthi adalah membuat Yaman menjadi teokrasi Islam seperti Iran. Untuk itu, Iran membantu proses perjuangan kekuasaan Houthi di Yaman (Alkaff, 2015). Meskipun pasukan milisi Houthi kemungkinan besar tidak bergantung pada Iran untuk semua persenjataan, keuangan, dan tenaga kerja mereka, banyak pengamat setuju bahwa Iran dan Hizbullah telah membantu pasukan Houthi dengan memberikan saran, pelatihan, dan pengiriman senjata. Pada 2016, satu Komandan Hizbullah yang tidak disebutkan namanya diwawancarai tentang dukungan kelompoknya untuk Houthi yang mengatakan:

“After we are done with Syria, we will start with Yemen, Hezbollah is already there.... Who do you think fires

Tochka missiles into Saudi Arabia? It's not the Houthis in their sandals, it's us" (Arraf, 2017)

Tuduhan dukungan militer Iran terhadap Houthi terus digulirkan oleh Arab Saudi. Sebelum konflik 2015, pemerintah pusat Yaman telah memperoleh varian rudal Scud-B dari Uni Soviet dan Korea Utara. Houthi mengambil kendali atas rudal-rudal ini bersamaan ketika mereka menguasai ibukota. Sejak tahun 2016, Houthi telah menembakkan rudal balistik jarak pendek "Burkan", yang diklaim berkisar 500-620 mil, ke Arab Saudi (versi terbaru adalah Burkan-2H). Pada November 2017, setelah Houthi menembakkan Burkan-2H jauh ke dalam wilayah Arab Saudi, koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Burkan-2H adalah rudal Qaim yang diproduksi Iran. Dalam dengar pendapat di hadapan *House Armed Services Committee*, Komandan *United States Central Command (CENTCOM)* Jenderal Votel mengatakan:

Certainly, as we've seen with Ambassador Haley and her demonstration, most recently, with some of the items recovered from Saudi Arabia, these weapons pose the threat of widening the conflict out of ... Yemen and, frankly, put our forces, our embassy in Riyadh, our forces in the United Arab Emirates at risk, as well as our partners'.... As we look at places like the Bab-el-Mandeb, where we see the introduction of coastal defense cruise missiles, some that have been modified, we know these are not capabilities that the Houthis had. So they have been provided to them by someone. That someone is Iran (Sharp, 2018).

Pada musim panas 2018, *UN Panel of Experts on Yemen* memberikan laporan rahasia kepada Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Iran terus melanggar embargo senjata internasional dengan memasok senjata canggih kepada Houthi. Setelah para ahli PBB

mengunjungi Arab Saudi dan memeriksa puing-puing dari rudal yang ditembakkan oleh Houthi, laporan mereka mencatat bahwa senjata ini menunjukkan karakteristik yang mirip dengan sistem senjata yang diproduksi di Iran. Pada Mei 2018, *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjuk lima orang Iran yang telah memberikan pelatihan keahlian teknis terkait rudal balistik kepada Houthi Yaman dan mentransfer senjata yang tidak terlihat di Yaman sebelum konflik saat ini, atas nama *Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force* (IRGC-QF) (Sharp, 2018).

IRGC Iran telah menyediakan pendanaan, pelatihan, dan persenjataan canggih kepada Houthi selama lebih dari satu dekade. IRGC juga diyakini telah mentransfer kemampuan roket dan rudal kepada Houthi. Pada 09 Maret 2017, Senator Bob Corker kepada Komite Senat Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa Iran terus memberikan senjata kepada pasukan Houthi, meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB melarang tindakan seperti itu. Houthi telah menggunakan senjata-senjata ini untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat dari pantai Yaman, dan mereka meluncurkan rudal yang melintasi perbatasan ke Arab Saudi.

Thomas Joscelyn dari *Foundation of the Defense of Democracies* pada sidang yang sama menambahkan bahwa Iran dan Houthi adalah sekutu yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Iran memiliki kepentingan untuk bekerja dengan Houthi melawan pasukan yang didukung oleh Arab Saudi di Yaman, dan juga mendorong serbuan Houthi ke dalam Arab Saudi. Dalam Laporan Negara tentang Terorisme 2012, Departemen Luar Negeri mencatat bahwa Iran secara aktif mendukung anggota suku Houthi di Yaman Utara, termasuk kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kemampuan militer, yang dapat menimbulkan ancaman lebih besar terhadap keamanan dan stabilitas di Yaman dan kawasan sekitarnya. Pada Juli 2012, Kementerian Dalam Negeri Yaman menangkap anggota dari sebuah ring mata-mata Iran, yang dipimpin oleh mantan

anggota IRGC (The Embassy of the Saudi Arabia Washington D.C., 2017).

Menanggapi hal tersebut, Iran melihat klaim Koalisi Arab Saudi dan pemerintahan Hadi tentang peran Iran di Yaman dianggap berlebihan. Meskipun Houthi menerima beberapa dukungan dari Iran, tapi Iran tidak mempengaruhi pengambilan keputusan Houthi. Dukungan militer yang diberikan kepada Houthi sejak 2011 sebagian besar terbatas pada pelatihan, dan sebagian besar disalurkan melalui Hizbullah.

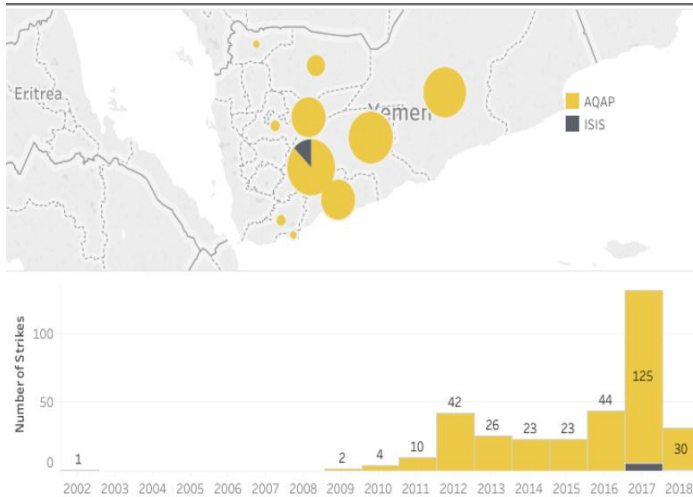
Hal menarik disampaikan oleh *UN Panel of Experts on Yemen* yang bertentangan dengan apa yang disampaikan ke Arab Saudi. *UN Panel of Experts on Yemen* menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengonfirmasi pasokan senjata skala besar langsung dari pemerintah Iran mengingat kuatnya pertahanan Koalisi Arab Saudi di udara dan laut Yaman. Setelah pengambilalihan Houthi dari Sana'a, telah terjadi intensifikasi retorika sektarian, yang cenderung menggambarkan Houthi sebagai Syiah yang didukung Iran di Yaman. Namun, Syiah Zaydi—agama yang dianut oleh anggota Houthi—sangat berbeda dari tradisi Syiah Twelver yang dominan di Iran, dan sebenarnya jauh lebih dekat dalam praktik dengan Islam Sunni (Arraf, 2017).

3. Amerika Serikat

Sama halnya seperti Arab Saudi dan Iran, Amerika Serikat juga memiliki misi tersendiri dalam keterlibatannya di konflik Yaman. Sejak peristiwa terorisme 9/11 yang menghancurkan gedung *World Trade Center* pada tahun 2001, Amerika Serikat gencar memburu kelompok-kelompok terorisme. Akibat dari konflik internal di Yaman, Amerika Serikat menduga Yaman akan menjadi tempat yang subur bagi langkah-langkah awal gerakan terorisme.

Untuk itu, kepentingan utama Amerika Serikat membantu Arab Saudi dalam intervensi konflik Yaman tidak lain adalah untuk membasmi akar-akar terorisme yang kemungkinan muncul di Yaman. Ketika koalisi yang dipimpin Arab Saudi melawan Houthi di Yaman, Amerika

Serikat tidak hanya mempertahankan operasi melawan AQAP tetapi juga telah meningkatkan tempo serangan pada tahun 2017, meskipun tempo penyerangan tersebut dikurangi pada tahun 2018. Menurut *Long War Journal* dan menggunakan data yang disediakan oleh CENTCOM, pada tahun 2018, serangan A.S. di Yaman telah menurun secara drastis dari rekor tertinggi tahun lalu yaitu 131, yang lebih dari gabungan empat tahun sebelumnya. Pada tingkat saat ini, sekitar setengahnya akan dilakukan tahun ini. Yang mengatakan, dengan 31 serangan sejauh ini pada tahun 2018, Amerika Serikat berada pada kecepatan untuk melampaui total serangan untuk setiap tahun sebelumnya, kecuali 2017.



Gambar 3. 1 Wilayah Serangan AS di Yaman

Sumber: (Sharp, 2018)

Setelah penyerangan yang berlangsung sejak 2015 bersama dengan Koalisi Arab, dunia internasional mengecam penyerangan yang berlangsung karena banyak memakan korban sipil. Menanggapi kekhawatiran tentang korban sipil akibat serangan tersebut, Pemerintahan Obama menarik personel Amerika Serikat dari *Joint Planning Cell* Amerika Serikat-Arab Saudi pada bulan Juni 2016.

Kemudian Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa mereka akan menanggihkan rencana penjualan amunisi ke Arab Saudi. Namun, pada tahun 2017, Presiden Trump mengumumkan akan melanjutkan penjualan amunisi yang ditanggihkan dan mengarahkan pemerintahannya untuk fokus mengakhiri perang dan menghindari konflik regional, mengurangi krisis kemanusiaan, dan mempertahankan integritas dan perdagangan dengan Arab Saudi di Laut Merah.

Namun, karena serangan udara Koalisi terus berakibat pada korban sipil, telah terjadi serentetan kritik yang diarahkan terhadap pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden Trump atas fasilitasi kampanye udara Koalisi Arab Saudi. Beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa penjualan senjata dan dukungan militer Amerika Serikat ke koalisi telah memunculkan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Sementara yang lain berpendapat bahwa dukungan Amerika Serikat untuk koalisi meningkatkan efektivitasnya dan dengan demikian dapat membantu meminimalkan korban sipil. Pada bulan Februari 2018, Penasihat Umum Departemen Pertahanan menyebutkan dukungan Amerika Serikat sejauh ini adalah menyediakan layanan pertahanan Koalisi, termasuk pengisian bahan bakar *air-to-air*; dukungan intelijen tertentu, dan saran militer, termasuk saran mengenai kepatuhan terhadap hukum konflik bersenjata dan praktik terbaik untuk mengurangi risiko korban sipil.

Fakta menyebutkan bahwa diluar kontroversi dukungan Amerika Serikat kepada Koalisi Arab Saudi, beberapa pengamat berpendapat bahwa kekuatan AQAP di Yaman telah berkurang secara signifikan akibat operasi kontraterorisme Amerika Serikat dan Koalisi. Menurut Gregory D. Johnsen, *resident scholar* di *Arabia Foundation* menyatakan bahwa AQAP lebih lemah sekarang daripada di titik mana pun sejak dibentuk pada 2009 (Sharp, 2018)

Pada Agustus 2018, pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa salah satu target bernilai paling tinggi dalam organisasi AQAP, pembuat bom Ibrahim al Asiri,

telah tewas dalam serangan udara Amerika Serikat tahun lalu. Asiri adalah warga negara Arab Saudi yang diyakini telah menciptakan alat peledak yang digunakan pada Hari Natal 2009. Ia mencoba membom Penerbangan *Northwest Airlines* 253, dalam serangan 2009 terhadap mantan kepala intelijen Arab Saudi Mohammed bin Nayef, dan paket kargo udara Oktober 2010 yang akan diberikan untuk situs Yahudi di Chicago (Amin, 2015).

Hingga saat ini, dua tentara Amerika telah tewas dalam kampanye melawan terorisme Amerika Serikat yang sedang berlangsung melawan AQAP dan teroris lainnya di dalam Yaman. Pada bulan Januari 2017, Ryan Owens, seorang Navy SEAL, meninggal dalam serangan melawan terorisme. Serangan tersebut adalah operasi kontrateror yang pertama kali dibawah Pemerintahan Trump. Pada bulan Agustus 2017, Emil Rivera-Lopez, seorang anggota Resimen Penerbangan

Operasi Khusus ke-160, meninggal ketika helikopter Black Hawk-nya jatuh di lepas pantai Yaman selama latihan (Arraf, 2017).